



Sinergitas Komunikasi TNI dengan BNPP dalam Penanggulangan Bencana Alam untuk Mendukung Tugas TNI

Edi Risnandar¹, Ruruh Prasetya²

^{1,2}Sekolah Staff dan Komando Angkatan Laut, Indonesia

E-mail: edirisnandar@stima.immi.ac.id, ruruh.prasetya@gmail.com

Article Info	Abstract
Article History Received: 2023-08-12 Revised: 2023-09-15 Published: 2023-10-02 Keywords: <i>Communication;</i> <i>TNI;</i> <i>BNPP.</i>	What the Indonesian people are really worried about are natural disasters in the form of earthquakes, this is because every year there are an average of 6000 earthquakes with varying impacts. Without synergy between agencies, Indonesia will not be able to face challenges. The efforts of the TNI and Government in dealing with natural disasters at the central and regional levels is one of the synergies that must be optimized. Apart from serving as a defense force, the TNI also carries out a civil mission by assisting the government in dealing with natural disasters that occur in Indonesia. Therefore, with this journal article the aim is to find out how the TNI and BNPP (National Search and Rescue Agency) communicate in dealing with natural disasters in Indonesia regarding natural disaster management in supporting the TNI's duties. The method in this journal article uses qualitative inductive theory with data sources from interviews and literature studies. According to the findings of this journal article, coordination and communication between the TNI and BNPP during assistance with natural disaster management in the field lacks synergy.
Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2023-08-12 Direvisi: 2023-09-15 Dipublikasi: 2023-10-02 Kata kunci: <i>Komunikasi;</i> <i>TNI;</i> <i>BNPP.</i>	Yang sangat dikhawatirkan oleh masyarakat Indonesia adalah bencana alam berupa gempa bumi, hal ini dikarenakan setiap tahun rata-rata terjadi 6000 gempa bumi dengan dampak yang beragam. Tanpa sinergi antar sesama instansi, Indonesia tidak akan mampu menghadapi tantangan. Upaya TNI dan Pemerintah dalam menghadapi bencana alam di pusat dan daerah merupakan salah satu sinergi yang harus dioptimalkan. Selain bertugas sebagai kekuatan pertahanan, TNI juga mengemban misi sipil dengan membantu pemerintah dalam penanggulangan bencana alam yang terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, dengan adanya artikel jurnal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana TNI dan BNPP (Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan) berkomunikasi dalam menghadapi bencana alam di Indonesia terkait penanggulangan bencana alam dalam mendukung tugas TNI. Metode dalam artikel jurnal ini menggunakan teori induktif kualitatif dengan sumber data dari hasil wawancara dan studi kepustakaan. Menurut temuan artikel jurnal ini, koordinasi dan komunikasi antara TNI dan BNPP selama pendampingan terhadap penanggulangan bencana alam dilapangan kurang sinergis.

I. PENDAHULUAN

Ketakutan terbesar penduduk Indonesia adalah bencana alam berupa gempa bumi, setiap tahun rata-rata terjadi 6.000 gempa bumi dengan dampak yang beragam dan adanya tsunami merupakan salah satu bentuk dampak telah terjadinya gempa bumi di dasar laut. Terjadinya bencana tsunami menyebabkan kerusakan yang sangat parah bahkan dapat menyapu siapa saja yang dilaluinya termasuk dapat menyalakan semua orang. Contohnya tsunami akibat gempa Aceh tahun 2004 dan gempa Kepulauan Mentawai tahun 2010. Oleh karena itu, diperlukan kehati-hatian dan penanganan khusus untuk menghadapi dampak gempa bumi.

TNI dan pemerintah daerah telah bekerja sama dalam penanggulangan bencana alam sejak

lama, mulai dari tahap prabencana, saat terjadinya bencana bahkan sampai pasca bencana. Selain itu TNI dan pemerintah daerah juga melakukan koordinasi dalam mengurangi risiko bencana, mendeteksi kapan terjadinya bencana dan memulai upaya mitigasi bencana sesegera mungkin, sehingga koordinasi dalam penanganan penanggulangan bencana terus ditingkatkan. Tanpa sinergi antar instansi, pemerintah tidak akan bisa melakukan penanggulangan bencana alam secara menyeluruh.

Upaya TNI dan Pemerintah dalam menghadapi bencana alam di pusat dan daerah merupakan salah satu sinergi yang harus dioptimalkan. Selain bertugas sebagai kekuatan pertahanan, TNI juga mengemban misi sipil dengan membantu pemerintah dalam penanggulangan

bencana alam yang terjadi di Indonesia. Keikutsertaan TNI dalam rangka perbantuan penanggulangan bencana alam diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana.

Melihat kondisi diatas, maka dalam menghadapi suatu bencana dilapangan, TNI telah bekerjasama dengan BNPP untuk meningkatkan efektivitas tanggap bencana alam dalam mendukung tugas TNI. Mengingat dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menyebutkan bahwa TNI mempunyai 2 tugas yakni Operasi Militer Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Adapun dalam pelaksanaan tersebut dalam menjalankan tugas OMP dan OMSP dipengaruhi oleh perkembangan lingkungan strategis di tingkat internasional, regional dan nasional. Dengan demikian maka artikel jurnal ini akan membahas terkait dengan sinergitas komunikasi TNI dengan BNPP dalam penanggulangan bencana alam untuk mendukung tugas TNI.

II. METODE PENELITIAN

Dalam menulis artikel jurnal, penulis menggunakan metode kualitatif berbasis *ground theory*. Menurut Raico (2010), metode kualitatif adalah suatu metode yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang luas dan umum untuk menggali isi dari objek yang diselidiki dengan penemuan yang menekankan pada hasil teoretis yang diperoleh dari pengamatan empiris.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. TNI

Tentara Nasional Indonesia yang kemudian disingkat menjadi TNI yaitu pasukan bersenjata yang bertujuan untuk menghapus segala jenis senjata baik itu dilakukan oleh pihak internal maupun pihak eksternal. Adapun TNI terbagi menjadi tiga matra antara lain angkatan darat, angkatan laut dan angkatan udara. Sementara masing-masing dari angkatan tersebut dipimpin oleh seorang Kepala Staf Angkatan. Mengenai identitas TNI, dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 disebutkan bahwa:

- a) Tentara rakyat adalah tentara yang anggotanya warga negara Indonesia
- b) Prajurit-prajurit adalah prajurit yang berjuang untuk menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pantang menyerah dalam menjalankan tugasnya
- c) Tentara nasional adalah tentara yang mengabdikan untuk kepentingan negara dan

bukan untuk kepentingan suku, budaya, kelompok agama, atau ras

Sedangkan tugas dan fungsi TNI telah tertuang dalam pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa TNI mengemban dua fungsi pokok yaitu Operasi Militer Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Adapun tanggung jawab TNI untuk operasi militer masa perang dan non masa perang adalah sebagai berikut:

- a) Membersihkan Indonesia dari pemberontak bersenjata, separatistis dan terorisme
- b) Menjalin hubungan diplomasi yang baik dengan objek strategis nasional
- c) Melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri
- d) Mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya
- e) Sesuai sistem pertahanan global, memberikan kekuatan awal bagi pertahanan kawasan dan pendukungnya
- f) Mendukung tanggung jawab pemerintah daerah
- g) Membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penyelenggaraan tanggungjawab administratif dan pemeliharaan ketertiban hukum
- h) Membantu dalam mengamankan tamu, pegawai negara dan perwakilan lain dari pemerintah asing yang menjalankan bisnis di Indonesia
- i) Berkontribusi dalam penanggulangan bencana, membantu pengungsi, dan memberikan bentuk bantuan kemanusiaan lainnya
- j) Ikut serta dalam pencarian dan penyelamatan korban kecelakaan lainnya serta membantu kepolisian dalam membantu pemerintah untuk mengawasi penyelidikan dan menyelidiki aktivitas penyelundupan, pemalsuan dan pembajakan.

2. BNPP

BNPP yaitu lembaga pemerintah yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencarian dan pertolongan (*Search and Rescue* yang disingkat SAR), dulu sebelum BNPP disahkan oleh Presiden Jokowi tahun 2016 melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016, nama BNPP adalah BASARNAS. Sehingga tanggung jawab pada lembaga ini tertuang dalam Peraturan Presiden yang

disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 6 September 2016. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang BNPP, BNPP mempunyai tugas dalam menyelenggarakan operasi penyaluran bantuan dan pencarian di bidang kecelakaan, bencana dan situasi yang membahayakan manusia.

Selain melaksanakan tugasnya, BNPP juga membantu dalam melaksanakan tugas lain sesuai ketentuan badan pengatur perencanaan. Oleh karena itu, tanggung jawab utama BNPP antara lain:

- a) Dalam proses pelaksanaan pencairan dan bantuan, BNPP membuat daftar standar, prosedur, kriteria, persyaratan dan prosedur perizinan
- b) Memberikan bantuan dalam penyelenggaraan pencarian dan pertolongan
- c) Sesuai dengan ketentuan peraturan prosedur, BNPP menentukan standarisasi persyaratan bantuan di lapangan
- d) Berkoordinasi dengan instansi terkait
- e) Mengatur sistem informasi dan komunikasi
- f) Menyampaikan informasi penyelenggaraan penyaluran dan juga bantuan kepada masyarakat
- g) Menyampaikan informasi kepada penyelenggara operasi penyaluran bantuan

3. Sinergitas Komunikasi TNI Dengan BNPP Dalam Penanggulangan Bencana Alam Untuk Mendukung Tugas TNI

Hasil dari wawancara dengan Kolonel Infanteri Kristomi Sianturi, S.Sos., M.Si (Han) selaku Paban IV/Opsdagri Sops TNI dan dengan Alnggit Mulyo Satoto, S.S., M.M. selaku Analis Kebijakan Ahli Madya BNPP, disimpulkan bahwa kegiatan komunikasi TNI dengan BNPP dalam melaksanakan perbantuan dilapangan tidak mencerminkan sinergitas antar keduanya, hal ini tentunya jika dibiarkan begitu saja maka akan mempengaruhi segala jenis kinerja dalam melaksanakan perbatuan di lapangan. Mengingat bahwa Indonesia adalah negara yang sering mengalami peristiwa bencana alam, yang artinya TNI dengan BNPP akan terus bekerjasama dalam menangani peristiwa bencana tersebut, bila tidak ada komunikasi yang sinergis antar keduanya dikhawatirkan akan berimbas pada instansi masing-masing. Adapun yang menjadi kendala pada sistem koordinasi dan komunikasi antara TNI dengan BNPP, yaitu:

- a) Adanya sinergitas jejaring komunikasi dain distribusi data yang tidak berjalan dengan baik di tingkat pimpinain kementerian/ lembaga/dinas yang berdampak pada sistem koordinasi dan komunikasi antar kedua belah pihak
- b) Adanya ketidakpahaman dalam memahami posisi tupoksinya masing-masing yang berdampak pada disharmoni selama pelaksanaan penanggulangan bencana.

Selain itu ditemukan data dari Kolonel Infanteri Kristomi Sianturi, S.Sos., M.Si (Han) yang mengatakan bahwa TNI mempunyai kajian strategi komunikasi dan keamanan dalam melaksanakan perbantuan di lapangan bersama dengan BNPP, meski TNI memberikan dukungan strategis kepada SAR sebagai institusi yang potensial, namun tetap TNI wajib mendukung BNPP sesuai dengan tujuan Undang-Undang. Akan tetapi di dalam organisasi BNPP sendiri ternyata ada beberapa kendala yang harus dihadapi, hal ini sesuai dengan apa yang diutaran oleh Anggit Mulyo Satoto, S.S., M.M. selaiiku Anailis Kebijakan Ahli Madya BNPP, permasalahan tersebut diakibatkan oleh :

- a) Miskomunikasi dan miskoordinasi sering terjadi karena Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 *jo* Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 belum sepenuhnya dipahami oleh seluruh personel atau elemen di lapangan.
- b) Pelaksana di lapangan tidak sepenuhnya memahami struktur kontrol untuk operasi pertolongan dan bantuan.
- c) Pemenuhain kompetensi bidaing pencarian dan pertolongan belum dipatuhi dan hal ini sangat berisiko pada memperparah kondisi korban atau menambah jumlah korban (bairu)

Adanya kendala diatas menjadikan suatu pelajaran yang harus diselesaikan, karena hal ini akan menjadi permasalahan baru bila tidak diselesaikan dengan segera. Padahal sistem kerja pertahanan negara ketika menghadapi suatu bencana menempatkan TNI dan BNPP dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai tameng bantuan pertahanan. Sehingga seharusnya hubungan kedekatan harus dibangun melalui strategi yang efektif. Adapun strategi efektif yang sudah dibangun oleh keduanya yaitu:

- a) Menempatkan BNPP pada posisi yang sesuai dengan Peraturan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Komando Daerah Darurat Bencana dan BNPP sebagai *leading sector* bantuan
- b) Memperkuat kompetensi secara kelembagaan dan personal dengan membentuk Tim Urbain SAIR, dimainai secairai internasional bahwa BNPP atas nama Indonesia diakui pada posisi *medium class* dan selanjutnya pada level nasional BNPP menyelenggarakan *National Accreditation Process* untuk pembentukan Tim Urban SAIR *light class*.

Adanya strategi yang dibangun diatas ternyata tidak serta merta berjalan dengan lancar, masih ada kendala yang harus dihadapi terkait dengan kejelasan posisi dan fungsi masing-masing karena hal tersebut belum dipahami oleh semua pelaksana. Bila dicermati dengan seksama terkait dengan Undang-Undang yang ada seperti Undang-Undang Pertahanan, di dalam Undang-Undang tersebut hanya menyebutkan bahwa TNI sebatas membantu penanggulangan bencana yang melanda Indonesia, di dalam Undang-Undang tidak ada pembahasan secara spesifik bagaimana TNI secara teknis dapat membantu penanggulangan bencana tersebut. Seperti contoh dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 *jo* Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 mengatakan bahwa TNI ditempatkan pada posisi membantu instansi lain sesuai permintaan, termasuk mengerahkan TNI untuk menanggulangi bencana alam yang membutuhkan penanggulangan cepait. Bila dicermati dari bunyi Undang-Undang tersebut bisa disimpulkan bahwa tidak ada penjelasan secara teknis terhadap TNI dalam membantu penanggulangan bencana alam, tentunya hal ini membuat suatu permasalahan baru ditubuh TNI dalam melaksanakan atau menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.

Adapun solusi dalam menghadapi disharmoni komunikasi yang dilakukan oleh TNI dengan BNPP dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing dalam menanggulangi bencana alam aintairai lain:

- a) Mengesampingkan *ego sectorail*, para pimpinan kementerian atau Lembaga atau dinas duduk bersama dan saling menghormati posisi dan peran masing-masing.

- b) Para pimpinan kementerian atau Lembaga atau dinas memperkuat sinergi secara nyata yang dapat diteladan di tingkat pelaksana.
- c) Secara Bersama-sama mensosialisasikan posisi dan peran masing-masing kementerian atau Lembaga atau dinas sesuai porsinya kepada para pelaksana di lapangan untuk menghindari disharmoni.

Adapun kondisi ideal mengenai upaya sistem koordinasi dan komunikasi dalam penanggulangan akibat bencana alam yang harus diterapkan dilapangan menurut Brigjen TNI Widjaing Pranjonto, antara lain:

- a) Dibangun *National Integrated Coordination System* yang mewadahi seluruh kepentingan kementerian/lembaga sesuai posisi dan peran masing-masing.
- b) Adanya anggaran dalam pengembangan sistem dari pemerintah pusat harus daipait digunakain atau dioperasikan oleh seluruh kementerian/lembaga terkait.

Dengan adanya tupoksi yang jelas antara TNI dengan BNPP dalam mendukung perbantuan dilapangan akan memberikan suatu hal yang penting dalam mendukung tugas dan fungsi dari TNI dalam melaksanakan Operasi Militer Selain Perang yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, mengingat salah satu tugas dan fungsi dari TNI adalah melaksanakan perbantuan di lapangan akibat bencana alam dalam menjalankan Operasi Militer Selain Perang guna menghadapi ancaman nirmiliter yang melanda bangsa Indonesia.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Dengan adanya artikel jurnal ini maka ditemukan hasil bahwa masing-masing instansi dalam menjalankan tugas untuk perbantuan dilapangan terkait dengan kebencanaan pada tataran informasi dan komunikasi, ditemukan hasil bahwa kurang terdapatnya hubungan yang sinergis antara TNI dengan BNPP. Sehingga solusi upaya pelaksanaan sistem koordinasi dan komunikasi dalam penanggulangan akibat bencana alam yang harus diterapkan dilapangan bagi TNI dan BNPP, antara lain:

- a) Mengesampingkan *ego sectoral*, para pimpinan kementerian atau Lembaga atau dinas duduk bersama dan saling

menghormati posisi dan peran masing-masing.

- b) Para pimpinan kementerian atau Lembaga atau dinas memperkuat sinergi secara nyata yang dapat diteladani di tingkat pelaksana.
- c) Secara Bersama-sama mensosialisasikan posisi dan peran masing-masing kementerian atau Lembaga atau dinas sesuai porsinya kepada para pelaksana di lapangan untuk menghindari disharmoni.

B. Saran

Pembahasan terkait penelitian ini masih sangat terbatas dan membutuhkan banyak masukan, saran untuk penulis selanjutnya adalah mengkaji lebih dalam dan secara komprehensif tentang Sinergitas Komunikasi TNI dengan BNPP dalam Penanggulangan Bencana Alam untuk Mendukung Tugas TNI.

DAFTAR RUJUKAN

Algus Widjojo, "Waiwaisain Maisai Depain Tentaing Sistem Pertaihainain Keaimainain Negairai", Dailai

M Indriai Saimego (Ed), *Sistem Pertaihainain-Keaimainain Negairai: Alnailisis Potensi Dain Problem*, (Jaikairtai: The Haibibie Center, 2001), Hlm. 44

Terry Tresnai Purnaimai 171103384. Implementaisi Sinergitais Dain Kemitraiaain Insain Litbaing Alkmil Dailaim Mewujudkain The Word Claiss Militairy Alcaidemy. Prograim Maigister Mainaijemen Stie Widyai Wiwaihai Yogyakairtai. Tesis Hail 17

Internaitionail Aleronaiuticail & Mairitime Seairch aind Rescue (IAIMSAIR) Mainuail, 1998. Internaitionail Seairch aind Rescue AIdvisory Group (INSAIRAIG) Guidelines aind Methodology, 2002.

Undaing-Undaing No. 3 taihun 2002 tentaing Pertaihainain Negairai

Undaing-Undaing No. 24 Taihun 2007 tentaing Penainggulaingain Bencaainai

Undaing-Undaing Nomor 29 Taihun 2014 jo Peraiturain Pemerintah Nomor 22 Taihun 2017 jo Peraiturain Pemerintah Nomor 36 Taihun 2006 tentaing Pencairiain dain Pertolongain.

Peraiturain Presiden Nomor 99 Taihun 2007 tentaing Baidain SAIR Naisionail.

Peraiturain Kepailai Baidain SAIR Naisionail Nomor PK.14 Taihun 2012 tentaing Staindairisaisi Sairainai SAIR di Lingkungain Baidain SAIR Naisionail.

Peraiturain Kepailai Baidain SAIR Naisionail Nomor PER.KBSN-01/2008 tentaing Orgainisaisi dain Taitai Laiksainai Baidain SAIR Naisionail sebaigaiimainai telaih beberaipai kaili diubahi teraikhir dengain Peraiturain Kepailai Baidain SAIR Naisionail Nomor PK. 15 Taihun 2014.

Peraiturain Kepailai Baidain SAIR Naisionail Nomor PK.08 Taihun 2010 tentaing Orgainisaisi dain Taitai Kerjai Kaintor SAIR sebaigaiimainai diubahi dengain Peraiturain Kepailai Baidain SAIR Naisionail Nomor PK.20 Taihun 2014.